



Editor:

Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.
Dr. Deni Bram, S.H., M.H.

Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara



UNTAR
Universitas Tarumanagara



Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara



Buku bunga rampai hukum yang membahas tentang Hukum dan Keadilan, serta berbagai masalah Hukum Nasional dan Internasional ini, merupakan bahan bacaan untuk melengkapi literatur hukum saat ini. Buku ini perlu dibaca karena menganalisis dan mengkaji berbagai masalah yang berkaitan dengan perkembangan hukum nasional maupun internasional serta masalah-masalah hukum yang berkeadilan, karena mengetahui dan memahami hukum secara komprehensif sebagai suatu sistem yang terintegrasi menjadi sangat penting.

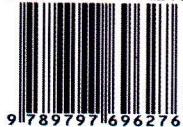
Hukum dan keadilan merupakan dua masalah yang tidak dapat dipisahkan dalam perkembangan hukum nasional dan internasional di berbagai bidang hukum, baik privat maupun publik, karena salah satu tujuan hukum adalah terciptanya rasa keadilan di kehidupan masyarakat. Hukum berfungsi sebagai norma untuk mengatur hubungan antaranggota masyarakat, sehingga membuat manusia terikat dengan kewajiban dan tanggung jawab hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum menetapkan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam kerangka hidup bersama orang lain. Penegakan hukum demi terwujudnya keadilan yang hakiki di kehidupan masyarakat mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan atau arbitrase maupun mekanisme alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Aturan hukum yang dibuat juga harus berorientasi pada keseluruhan sistem hukum dan mengacu nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.

Buku ini diperuntukkan sebagai bahan bacaan bagi kalangan mahasiswa, para akademisi dan praktisi hukum yang ingin mengetahui dan memahami berbagai masalah yang berkaitan dengan hukum dan keadilan serta perkembangan hukum nasional maupun internasional saat ini. Para pembaca akan memperoleh tambahan wawasan baru dalam berbagai bidang hukum setelah membaca literatur ini.



Jl. Raya Leuwihanggung No. 112
Kel. Leuwihanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956
Telp 021-84311162 Fax 021-84311163
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PEGURUAN TINGGI
ISBN 978-979-769-627-6



HUKUM DAN KEADILAN (ASPEK NASIONAL & INTERNASIONAL)

Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M

Dr. Deni Bram, S.H., M.H.



Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada

JAKARTA

Sudiro, Amad

Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)/Amad Sudiro, Deni Bram

—Ed. 1—1.—Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

xvi, 440 hlm., 24 cm

ISBN 978-979-769-627-6

HUKUM DAN KEADILAN
(ASPEK NASIONAL &
INTERNASIONAL)

1. Hukum

2. Keadilan

I. Amad Sudiro, Deni Bram

340

Hak cipta 2013, pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2013.1329 RAJ

Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.

Dr. Deni Bram, S.H., M.H.

HUKUM DAN KEADILAN (ASPEK NASIONAL & INTERNASIONAL)

Cetakan ke-1, Oktober 2013

Hak penerbitan pada PT Rajagrafindo Persada, Jakarta

Desain cover oleh Renita Margaretha

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-14240 Jl. Pelelah Asri I Blok QJ 2 No. 4, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Telp. (021) 4527823. **Bandung**-40243 Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi Telp. (022) 5206202. **Yogyakarta**-Pondok Soragan Indah Blok A-1, Jl. Soragan, Nghestiharjo, Kasihan Bantul, Telp. (0274) 625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok. A No. 9, Telp. (031) 8700819. **Palembang**-30137, Jl. Kumbang III No. 4459 Rt. 78, Kel. Demang Lebar Daun Telp. (0711) 445062. **Pekanbaru**-28294, Perum. De'Diandra Land Blok. C1/01 Jl. Kartama, Marpoyan Damai, Telp. (0761) 65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3 A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. (061) 7871546. **Makassar**-90221, Jl. ST. Alaudin Gg. Blok A 9/3, Komp. Perum Bumi Permata Hijau, Telp. (0411) 861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 33 Rt. 9, Telp. (0511) 3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol g. 100/v No. 5b, Denpasar, Bali, Telp. (0361) 8607995

KATA PENGANTAR EDITOR

Setiap negara selalu berusaha untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Keadilan ini berarti bahwa setiap orang yang dilahirkan dalam negara tersebut akan mendapat perlakuan yang sama. Namun, dalam praktiknya, keadilan ini sering kali sulit diterapkan. Hal ini terjadi karena adanya ketidakadilan dalam sistem hukum, adanya korupsi dalam penegakan hukum, dan adanya ketidakadilan dalam penyelesaian sengketa. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang kuat dan berkoordinasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat.

Aturan hukum sangat dibutuhkan

Aturan hukum sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, demi terwujudnya ketertiban, keamanan, ketentraman, dan tercapainya rasa keadilan di tengah masyarakat. Hal ini merupakan salah satu fungsi hukum yang harus dikedepankan secara bersama-sama di setiap sendi kehidupan umat manusia. Hukum tidak hanya berpegang pada aturan yang dibuat oleh penguasa, tetapi harus kembali kepada nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Memahami hukum secara komprehensif sebagai suatu sistem yang terintegrasi menjadi sangat penting untuk dilakukan. Strategi pembangunan hukum dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan gagasan negara hukum tidak boleh terjebak hanya berorientasi membuat hukum saja atau hanya dengan melihat salah satu elemen/aspek dari keseluruhan sistem hukum yang ada.

Secara konsepsional, hukum sejatinya mengejar esensi keadilan sebagai tujuan primernya. Namun, cita-cita mulia hukum seperti itu sering berbanding terbalik dengan realitasnya. Pada dasarnya hukum sebagai norma memiliki watak *das sollen*. Hukum menetapkan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam kerangka hidup bersama orang lain. Adanya hukum yang berfungsi sebagai norma untuk mengatur hubungan antar anggota masyarakat, membuat manusia terikat dengan kewajiban dan tanggung jawab hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam penegakan hukum (*law enforcement*) demi tercapainya rasa keadilan yang hakiki mencakup berbagai kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum yang berkeadilan, serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap



pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan atau arbitrase dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes resolution*). Dalam pengertian yang lebih luas, kegiatan penegakan hukum yang berkeadilan mencakup juga segala aktivitas yang bertujuan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.

Buku bunga rampai hukum yang membahas sekitar Hukum dan Keadilan, serta berbagai masalah Hukum Nasional dan Internasional ini, merupakan bahan bacaan untuk melengkapi literatur hukum saat ini. Semoga dapat memberikan tambahan wawasan baru bagi pembaca, khususnya masalah-masalah yang berkaitan dengan berbagai aspek hukum yang dibahas di dalam buku ini.

Jakarta, 1 September 2013

Tim Editor



DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA PENGURUS YAYASAN TARUMANAGARA	v
SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA	vii
SAMBUTAN DEKAN FH UNIVERSITAS TARUMANAGARA	ix
KATA PENGANTAR EDITOR	xi
DAFTAR ISI	xiii
Bab 1 Nilai Keadilan pada Hubungan Pelaku Usaha dan Konsumen dalam Hukum Transportasi Udara Niaga (Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.)	1
Bab 2 Pengaruh Kerangka Hukum Pemerintah Daerah di Masa Hindia Belanda Terhadap Politik Hukum Pemerintah Daerah Masa Kini: Masalah Ketimpangan dan Keadilan (Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H., M.H.)	21
Bab 3 Fungsi Sosial Yayasan dalam Mewujudkan Keadilan Publik: Diskursus Normatif dan Efektivitas Implementasi UU Yayasan (Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., CIArb)	37
Bab 4 Penegakan Hukum Bagi Pertanggungjawaban Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Dr. Hasbullah F. Sjawie, S.H., LL.M, M.M.)	67



Bab 5	Urgensi Indonesia dalam Mempertahankan Kawasan Ambalat dan Ambalat Timur (Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.)	99
Bab 6	Penerapan Asas Peradilan dari <i>The Rule of Law</i> ke <i>The Rule of Justice</i> (Dr. Stanislaus Atalim, S.H., M.H.)	121
Bab 7	Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perundang-undangan Pidana dalam Proses Peradilan Pidana (Dr. Etty Utju Ruhayati, S.H., M.H.)	141
Bab 8	Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Eksistensi Sila Kelima Pancasila dalam Percaturan Masyarakat Global (Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M.)	163
Bab 9	Ketimpangan Emisi Nasional: Kajian Kritis Ketidakadilan Iklim Indonesia (Dr. Deni Bram, S.H., M.H.)	177
Bab 10	Free Trade Agreement Asean Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA): OPPORTUNITY, BARRIERS AND CHALLENGES TO THE INDONESIAN ECONOMIC LEGAL SYSTEM (Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.)	189
Bab 11	Kiat Baru yang Layak Diuji-coba untuk Mencegah dan Memberantas Korupsi di Indonesia Secara Efisien dan Efektif (Dr. HC. A.Ridwan Halim, S.H., STh., M.H.)	213
Bab 12	Analisis Putusan Nomor: 655/PDT.G/2008/PN. JKT.SEL tentang Putusan Perceraian atas Perkawinan Beda Agama antara Yuni Shara dan Hendri Siahaan yang Dilangsungkan di Luar Negeri Dilihat dari Sudut Hukum Perdata Internasional (Cut Memi, S.H., M.H.)	239
Bab 13	Sistem Penegakan Hukum Indonesia dan Permasalahannya (Drs. R. Priyanto, M.H.)	273



Bab 14	Environmental Refugees: Would The 1951 Refugee Convention Accommodate of Ignore Them (Drs. Teddy Nurcahyawan, S.H., M.A. and Jaya Soedjinto)	289
Bab 15	Politik Pertahanan Nasional Melalui Program Landreform (Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.)	309
Bab 16	Mempersoalkan Hukum dan Keadilan dalam Rangka Penerapan Kebijakan Bidang Pertanahan, Penataan Ruang, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Hasni, S.H., M.H.)	327
Bab 17	Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 (I Gusti Ayu Adi, S.H., M.H.)	345
Bab 18	Keadilan Pengupahan dan Kebutuhan Hidup Layak (Perspektif Pengusaha dan Buruh) (Ilya Utama Sumono, S.H.)	361
Bab 19	Regulasi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) di Indonesia: Merubah Konsep dari <i>Voluntary Menjadi Mandatory</i> (Sri Bakti Yunari, S.H., M.H.)	383
Bab 20	Hak Atas Tanah Timbul (<i>Aanslibbing</i>) dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia (Suhanan Yosua, S.H., MBL., LL.M., M.H., MTh.)	405
Bab 21	Summum Ius, Summa Iniuria (T.H.M. Daud Shah, S.H.)	425

